

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri banyak pulau mulai dari sabang sampai merauke. Wilayah yang sangat luas tersebut dihuni oleh banyak penduduk sehingga Indonesia kaya akan suku bangsa dan bahasa. Banyaknya suku bangsa di Indonesia memperkaya kebudayaan sekaligus memberikan warna dan corak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekayaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dari luar salah satunya adalah Tionghoa. Suku bangsa Tionghoa merupakan salah satu suku atau etnis yang berasal dari luar. Sejak masa orde baru keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia telah resmi

Menurut Suryadinata (2010) bahwa "Orientasi Orde Baru pada ekonomi membutuhkan penciptaan basis investasi yang luas dan bersifat massal. Dalam hal ini yang memenuhi syarat untuk menghimpun modal hanyalah golongan etnis Tionghoa karena lemahnya struktur modal yang dimiliki oleh para pengusaha pribumi." Pemerintah Soeharto benar-benar memberikan fasilitas dan proteksi untuk kemajuan bisnis beberapa tokoh Tionghoa, misalnya Sudono Salim. Motif di balik program pemerintah tersebut adalah untuk mengerahkan potensi ekonomi Tionghoa di Indonesia dan dengan demikian mendorong mereka menarik lebih banyak modal dari Singapura, Hongkong, dan pusat-pusat bisnis Tionghoa perantauan di Asia. Segala fasilitas pemerintah yang menguntungkan itu mempercepat kebangkitan kembali dominasi Tionghoa dalam ekonomi Indonesia dan mendepak perusahaan-perusahaan pribumi.

Lambat laun, para konglomerat etnis Tionghoa menganggap dirinya sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian pengusaha dan pelaku ekonomi etnis Tionghoa lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama dan jaringan kerja dengan pihak luar negara menjadi poin istimewa kegiatan ekonomi etnis Tionghoa pada tahun-tahun ini. Kedigdayaan bisnis mereka bahkan mampu mengendalikan arah kebijakan penguasa.

Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap representasi seluruh etnis Tionghoa, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang culas. Kedekatan dengan pejabat bahkan sampai ke hal-hal pribadi yang cenderung dihubungkan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Tionghoa kelas menengah dan atas.

Akumulasi kekayaan para konglomerat hitam juga terjadi karena jelang akhir kekuasaan Soeharto terjadi skandal perampokan Bank oleh sekelompok orang Tionghoa yang dikenal sebagai skandal BLBI. Bahkan Robinson (2005) menyebut telah terjadi konspirasi antara penguasa Orde Baru dengan sekelompok Tionghoa dan kapitalis dari Barat/Jepang yang sangat merugikan kelompok pengusaha pribumi.

Akibatnya, kecemburuan sosial sentimen anti-Tionghoa muncul kembali. Misalnya pada Januari 1974 terjadi demonstrasi massa anti-Tionghoa dan anti-Jepang yang dikenal dengan peristiwa Malari. Gejolak sosial yang dipicu "pribumi dan nonpribumi", juga meletup di berbagai kota. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuat pembedaan ini menjadi semakin rumit. Kerusakan yang muncul di berbagai kota di Indonesia menargetkan masyarakat etnis Tionghoa sebagai sasaran kebencian.

Setelah orde baru bergulir, banyak etnis Tionghoa yang mengalihkan aset-aset yang dimilikinya ke luar negeri, sambil membangun jejaring politik di dalam negeri dengan pejabat pemerintahan baru. Di awal pasca-Orde Baru, tepatnya di era Presiden Gus Dur, pengakuan eksistensi etnis Tionghoa mendapat porsi lebih besar. Segala ritual agama dan kebudayaan Tionghoa yang di masa Orde Baru dibatasi, kemudian dibebaskan. Salah satunya, ditetapkannya Hari Raya Tionghoa (Imlek) dan agama Konghucu oleh pemerintah. Demikian pula dari sisi ekonomi, bisnis etnis Tionghoa mendapatkan kegairahan kembali karena mendapatkan jaminan keamanan dan kemudahan dari negara.

Tak bisa dipungkiri, perilaku ekonomi etnis Tionghoa sepanjang sejarah memang masih dilema, peran ekonomi etnis Tionghoa dalam masyarakat Indonesia. Antara lain, yaitu: (a) kebobrokan ekonomi Indonesia adalah akibat banyaknya dana yang dibawa pengusaha etnis Tionghoa ke luar negara; (b) kolusi dan nepotisme menjadi kebiasaan pengusaha etnis Tionghoa yang mempengaruhi kepada kinerja para birokrat.

Menurut Airlangga (2016) hingga saat ini, etnis Tionghoa menguasai \pm 70% ekonomi nasional. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi masa depan Indonesia. Secara formal, sebagian besar warga Tionghoa memang tak peduli urusan politik, tapi ketidakpeduliannya justru menjadikan mereka 'bebas' bermain apa saja, termasuk menjadi cukong dan investor politik.

Di masa kolonial, sebagian mereka menjadi kaki tangan Belanda, di era Orde Baru mereka hanya mempengaruhi Soeharto dalam bidang ekonomi. Namun di era Reformasi, mereka tidak saja mengatur dari belakang layar, tetapi juga tampil langsung mengatur kekuasaan. Perjalanan perekonomian Indonesia mengalami banyak tantangan dan hambatan. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade 1980. Pasca resesi di awal sampai pertengahan tahun 1980, pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% per tahun. Namun ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5% setelah 1987 sampai tahun 1994 (Tjiptohrijanto, 1997, 21).

Dalam kepemimpinan presiden Indonesia, perjalanan perekonomian Indonesia mengalami naik turun. Pada tahun 1986-2000 keadaan perekonomian Indonesia tumbuh pesat dibawah kepemimpinan Soeharto, B.J Habibie dan Abdurrahman Wahid. Soeharto mulai menjalankan tugasnya sebagai presiden Indonesia ke-2 pada 12 Maret 1967, dinamakan masa Orde Baru. Pada tahun 1967, Indonesia berada dalam situasi yang kacau. Pendapatan per kapita turun sampai tingkat di bawah yang telah dicapai lima tahun sebelumnya, perekonomian hancur oleh hiper-inflasi, sektor pertanian tidak dapat lagi menyediakan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan kemiskinan menjadi nasib sebagian besar penduduk. Perbandingan Perekonian. Walaupun pemerintah Orde Baru bergerak cepat dan pasti untuk membangun sejumlah tujuan di bidang ekonomi, sampai tahun 1985 industrialisasi hanya berpengaruh kecil di Indonesia. Sektor pertanian menyumbang sekitar 24% dari PDB, sementara industri non migas menyumbang kurang dari 14% (Abimanyu (Ed.), 2010, 24-25).

Pada masa Soeharto banyak berdiri organisasi pengusaha seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri), Hippi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), HIPLI (Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), APEGTI (Asosiasi Pengecer Gula dan Terigu Indonesia), REI

(Real Estate Indonesia) dan ASI (Asosiasi Semen Indonesia), yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi anggota dan *bargaining power*-nya. Pendirian HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan sejenisnya mempunyai tujuan yang sama. Dalam perekonomian internasional, Indonesia masuk dalam OPEC (*Organisation of Petroleum Exporting Countries*) dan kerja sama regional APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) (Kuntowijoyo, 1995: 129-130).

Kemantapan struktur ekonomi nasional terlihat pada peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi dan yang lainnya (Odang, 1996, 16-17).

Pada pertengahan 1990-an, manufakturing berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama lebih dari satu dekade, dengan menyumbangkan hampir sepertiga dari kenaikan PDB dari tahun 1983 sampai 1995 (Emmerson (Ed), 2001, 195).

Orde Baru yang dibangun oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1966 telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Pada tahun 1996 atau 30 tahun kemudian sebagai hasil pembangunan, Indonesia mengalami dua kali *Quantum Leap*, dari negara miskin ke negara berkembang, dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Pada tahun 1966 tingkat kemiskinan diperkirakan lebih dari 50%, sementara pada tahun 1996 kurang dari 15%.

Inflasi sekitar 400% pada tahun 1966, sementara tahun 1996 kurang dari 10%. Bahkan, pendapatan per kapita melonjak dari USD200 pada tahun 1966 menjadi USD1.200 pada tahun 1996. Selama 25 tahun terakhir sebelum krisis 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak di kisaran 6%-8% per tahun (Abimanyu (Ed), 2010, 581-582).

Kebijakan fiskal tahun 1998 sampai 1999 pada awalnya diarahkan untuk berperan sebagai suatu kebijakan campuran (*policy mix*) dalam rangka membantu pengendalian laju inflasi dan nilai tukar rupiah di sektor moneter. Hal ini ditunjukkan oleh kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan sasaran defisit APBN yang disusun pada tanggal 23 Januari 1998, yaitu hanya 1-2% dari PDB.

Presiden Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998 saat terjadi gejolak sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Walaupun penggantian

presiden sudah dilakukan, Indonesia masih terpuruk dalam kemiskinan yang semakin meluas disertai ketegangan etnis daerah.

Pengangkatan B.J Habibie menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 diwarnai dengan suasana politik dan ekonomi yang kacau. B.J Habibie merupakan seorang ilmuwan tingkat internasional. Selama 17 bulan masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia ketiga, Habibie memperkenalkan reformasi pasca Soeharto. Ketika Habibie mulai memegang kekuasaan pada tanggal 21 Mei 1998, terdapat lima isu terbesar yang harus dihadapi yaitu, masa depan reformasi, masa depan ABRI (sekarang TNI), masa depan daerah yang melepaskan diri dari Indonesia, masa depan Soeharto (Keluarga, kekayaan dan kronikroninya) dan masa depan perekonomian serta kesejahteraan rakyat (Rickles, 2008).

Kabinet Presiden Habibie dibentuk dalam waktu 24 jam, dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat. Selama lima Repelita yang pertama di bawah pemerintahan Soeharto, dari 1969 sampai 1994, PDB meningkat rata-rata 6,8%setahun. Pertumbuhan penduduk rata-rata 2% setahun (Emmerson (Ed), 2001, 192).

Pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Peristiwa Badai El nino menjadikan panen beras berkurang. Nilai tukar rupiah berada di bawah Rp 10.000,00 per dollar, bahkan mencapai level Rp 15.000,00 - Rp 17.000,00 dan diperkirakan 113 juta orang Indonesia. (Abdul Hakim, Guswil, dan Giovani, 2002: 169)

Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%. B.J. Habibie mundur dari kekuasaan pada 20 Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid.

Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999. Gus Dur memiliki intelegensia, kekocakan, keterbukaan dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme (Rickles, 2008, 655).

Pada tahun 2000 beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diprakirakan, yakni menjadi 4,8%. Beberapa faktor

seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik, telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000 masing-masing mencapai 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Di sisi penawaran, semua sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan. Dengan dorongan permintaan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan menjadi motor pertumbuhan dengan sumbangan terhadap pertumbuhan pendapatan masing-masing sebesar 1,6%, 0,9%, dan 0,7%. Sektor industri pengolahan pada tahun 2000 mencatat pertumbuhan sebesar 6,2%, sementara sektor perdagangan serta sektor pengangkutan masing-masing meningkat sebesar 5,7% dan 9,4% (Bank Indonesia, 2000).

Dalam tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan yang antara lain mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik (TDL), tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, serta upah minimum regional (UMR). Selain itu, tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Peningkatan ekspektasi ini mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cenderung bersifat menetap (*persistent*). Secara keseluruhan, laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35% (*year-on-year*), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01% (Bank Indonesia, 2000). Kegigihan

mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, keterbatasan dalam pengelihatannya pada panca indra, masalah kesehatan, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, membuat Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden pada tanggal 23 Juli oleh MPR (Rickles, 2008, 655).

Penelitian ini, akan membahas tentang dominasi ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia, bagaimana etnis Tionghoa dapat mendominasi ekonomi di Indonesia. Tema ini penting untuk diteliti karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam bidang Ekonomi. Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan perekonomian bangsa. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam di Indonesia belum diimbangi kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya perusahaan-perusahaan milik warga pribumi yang mengelola potensi sumber daya alam Indonesia. Perekonomian Indonesia justru banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Tionghoa. Jika kualitas sumber daya manusia di Indonesia memadai, maka potensi-potensi sumber daya alam di Indonesia dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan Tionghoa berdiri yang hampir diseluruh wilayah Indonesia, baik perusahaan pada bidang elektronik maupun perusahaan lainnya yang ikut mendominasi sektor perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat menganalisis apa saja latar belakang, dampak-dampak yang akan ditimbulkan dan perkembangan ekonomi di Indonesia dari adanya dominasi etnis Tionghoa dibidang ekonomi pada masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Latar Belakang dominasi Etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi di Indonesia tahun 1986-2000?
2. Bagaimanakah Perkembangan Dominasi ekonomi Etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1986-2000?
3. Bagaimana dampak dominasi kelompok etnis Tionghoa terhadap perekonomian Indonesia tahun 1986-2000?

Dari rumusan masalah di atas maka diangkatlah judul kajian sebagai berikut :“Dominasi Kelompok Etnis Tionghoa Pada Bidang Ekonomi Di Indonesia Tahun 1986-2000”

C. Tujuan Kajian

Tujuan kajian merupakan sasaran yang ingin dicapai seorang peneliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Latar Belakang dominasi Etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi di Indonesia tahun 1986-2000.
2. Untuk memaparkan perkembangan dominasi ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia tahun 1986-2000.
3. Untuk menganalisis dampak dominasi kelompok etnis Tionghoa pada bidang ekonomi terhadap perekonomian Indonesia tahun 1986-2000.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan tentang ilmu pengetahuan sosial, khususnya terkait dengan dampak adanya dominasi ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Guru Pendidikan Sejarah, hasil penelitian bermanfaat untuk membantu guru dalam memperluas wawasan mengenai sejarah Indonesia, khususnya etnis Tionghoa yang ada di Indonesia.
- b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat membantu memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai etnis Tionghoa di Indonesia
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang dengan melihat kesesuaiannya.

E. Metode Kajian

1. Metode Penelitian Sejarah/Historis

Penelitian historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dalam setiap tulisan sejarah yang melibatkan penelitian suatu gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang (aspek

diakronis) dan yang melibatkan penelitian aspek ekonomi, masyarakat, atau politik (aspek sinkronis), pasti menggunakan pendekatan ilmu sosial (Kuntowijoyo, 2013:89). Dalam suatu masalah dapat diperlukan beberapa metode untuk memecahkan masalah. Menurut Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen, dalam Zuriah (2005:51) menyatakan bahwa:

Penelitian sejarah adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa metode penelitian sejarah adalah penelitian yang mencoba merekonstruksi dan mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan mencari sebab-sebab peristiwa itu terjadi. Penelitian ini akan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber-sumber serta menguji data-data tersebut berdasarkan fakta yang dapat dipercaya. dalam penelitian ini penelitian sejarah yang akan dilakukan adalah dengan mengkaji berbagai sumber, kemudian melakukan analisis terhadap sumber tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data (Heuristik)

Dalam melakukan sebuah penelitian sejarah, peneliti harus memerlukan suatu pengumpulan data-data atau sumber-sumber sejarah agar harapannya peneliti dapat memperoleh data yang benar dan akurat. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku sumber sejarah atau dokumen-dokumen yang terdapat di perpustakaan. Berikut ini adalah beberapa langkah dalam pengumpulan data:

Heuristik merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Penemuan disini maksudnya adalah memperoleh sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

Menurut Renier dalam Lubis (2011:17) menjelaskan:

Heuristik merupakan tahap awal dari seorang peneliti untuk melakukan sebuah penelitian sejarah sebelum menuju ke tahapan selanjutnya. Heuristik merupakan kegiatan awal kerja dari seorang peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber data sejarah yang akan dikaji. Kata Heuristik berasal dari kata *"heuriskein"* dalam bahasa Yunani yang berarti menemukan. atau memperoleh sumber sejarah.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa langkah awal yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai sumber-sumber data sejarah yang akan dikaji yaitu mengenai dominasi ekonomi etnis Tionghoa, keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1986-2000, dan dampak dominasi ekonomi Tionghoa. Sumber-sumber ini dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Sumber-sumber yang dikumpulkan dapat berupa buku-buku sejarah, arsip, maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung. Adapun sumber-sumber yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Sumber Data "Dominasi Etnis Tionghoa"

No	Jenis Sumber	Keterangan
1	Etnis Tionghoa Indonesia dalam Politik-Ekonomi	Buku
2	Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia	Buku
3	Peranakan Tionghoa di Nusantara	Buku
4	Negara dan etnis Tionghoa	Buku
5	Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia	e-Book
6	Perbandingan Perekonomian Indonesia dari Masa Soekarno-Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)	Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Studi kepustakaan tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dengan tema atau masalah yang sedang dikaji. Menurut Nazir (1988:111) mengungkapkan:

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas diambil pengertian bahwa Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Peneliti harus mencermati data-data yang diperoleh dengan cara mengkaji atau mempelajari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan obyek selama melakukan penelitian.

3. Keabsahan Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan peneliti harus diketahui keabsahan dan keasliannya melalui kritik sumber.

Menurut Abdurahman (2011:108) menyatakan bahwa:

Kritik sumber dapat disebut juga sebagai pengujian terhadap data yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. Kritik atau verifikasi itu ada dua macam : autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern.

Berdasarkan pendapat di atas sumber yang digunakan dalam penelitian harus dilakukan kritik sumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber kredibilitas dan tingkat kepercayaan sehingga sumber yang digunakan benar-benar merupakan sumber yang valid. Adapun kritik sumber yang dapat dilakukan yaitu:

a. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern digunakan untuk menguji otentistas (keaslian) suatu sumber atau bahan yang digunakan dalam penyusunan penelitian sejarah, kritik ekstern terdiri dari nama pengarang sumber dan waktu pembuatan sumber.

Sedangkan menurut Daliman (2014: 67) "Kritik eksternal ingin menguji otentitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber

yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu. Sumber yang asli biasanya waktu dan tempatnya diketahui.”

Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kritik eksternal adalah suatu langkah dalam sebuah penelitian sejarah yang bertujuan untuk menguji keaslian dari suatu sumber sejarah. Kritik ekstern merupakan kritik yang membangun dari luar sejarah, yang dilakukan dengan mencari kebenaran sumber sejarah melalui sejumlah pengujian terhadap berbagai aspek di luar sumber sejarah. Sumber sejarah harus melalui pengujian terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Pengujian pada sumber sejarah memiliki fungsi untuk memastikan bahwa apakah sumber sejarah mengalami perubahan atau tidak.

Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku atau dokumen tertulis maka langkah-langkah yang dilakukan dalam memberikan kritik ekstern adalah:

1. Memeriksa keaslian sumber yakni nama pengarang
2. Mereforasi teks yakni mengumpulkan beberapa kopian
3. Mengidentifikasi tanggal terbit buku
4. Memeriksa keotentikan (jenis kertas, tinta, pola tulisan, gaya bahasa)

Untuk mengetahui validitas sumber data dikemukakan dalam tabel kritik ekstern sebagai berikut :

Tabel 2 : Uji kesejatian sumber data

No	Jenis Sumber	Pengarang/ Penulis	Keterangan
1	Etnis Tionghoa Indonesia dalam Politik-Ekonomi	Mely G. Tan	Asli
2	Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia	Koentjaraningrat	Duplikat/salinan
3	Peranakan Tionghoa di Nusantara	Leo Suryadinata	Duplikat/salinan
4	Negara dan etnis Tionghoa	Iwan Santosa	Duplikat/salinan
5	Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia	Haryo Aswicahyono David Christian	e-Book
6	Perbandingan Perekonomian Indonesia dari Masa Soekarno-Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)	Abdul Hakim	Jurnal diterbitkan

b. Kritik Intern

Dalam penelitian sejarah selain melakukan pengujian sumber kritik ekstern juga diperlukan pengujian terhadap sumber kritik intern. Kritik intern merupakan penelitian keakuratan atau keautentikan terhadap materi sumber sejarah itu sendiri. Tujuan dari kritik intern adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa isi sumber sejarah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam kritik intern tersebut antara lain menguji kebenaran isi dan makna dari sumber sejarah dengan dibandingkan dengan sumber yang lain. Menurut Daliman (2014:75) bahwa:

Sasaran dari kritik internal adalah uji kredibilitas informan atau pengarang sumber atau dokumen. Uji kredibilitas berupaya untuk menguji: 1. Kemampuan untuk melapor atau menulis dokumen secara akurat. 2. Kemauan untuk melapor atau menulis dokumen dengan benar.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan kritik intern adalah mengevaluasi kebenaran fakta dan konsep sejarah yang ditulis dalam sumber dengan mengecek kecocokan antara konsep dan fakta dalam sumber data dengan peristiwa yang diteliti, menyesuaikan dan memahami tujuan penulisan sumber data.

Tabel 3. Kritik Intern Sumber Kajian

No	Buku Sumber	Konsep Yang Dibahas	Halaman Buku Sumber	Keterangan
1	Etnis Tionghoa Indonesia dalam Politik-Ekonomi	Pergolakan Ekonomi Indonesia	1 – 4 24 – 29	Asli
2	Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia	Rasa Nasionalisme etnis Tionghoa dalam membangun bangsa Indonesia	9 – 18 29 – 35 47 – 62 79 – 98	Salinan
3	Peranakan Tionghoa di Nusantara	Orang-orang Tionghoa dari segi perekonomian, sosial, politik, dan budaya	156 – 161 185 – 187 191 – 199	Salinan
4	Negara dan etnis Tionghoa	Membahas mengenai dominasi ekonomi kelompok Tionghoa	29 – 38 53 – 101	Salinan

5	Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia	Keadaan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan presiden pertama hingga presiden ke-7	65-101	Salinan
6	Perbandingan Perekonomian Indonesia dari Masa Soekarno-Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009)	Membahas mengenai ekonomi Indonesia	81 – 90 134 - 139	Salinan

Berdasarkan Tabel di atas kritik intern dari sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber dari setiap kajian memuat atau mengandung isi materi yang sama. Setiap sumber yang digunakan merupakan buku asli yang didalamnya berisi materi dengan menggunakan teknik bibliografi yaitu mengutip dari sumber-sumber yang ada berdasarkan fakta-fakta dan temuan-temuan lainnya.

Kritik intern dalam penulisan skripsi ini adalah terletak pada nama Cina diubah menjadi Etnis Tionghoa pada masa orde baru.

Setelah G30S 1965 orang-orang Tionghoa kerap dikaitkan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang oleh Orde Baru lebih suka disebut Republik Rakyat Cina (RRC). Karena negara yang dipimpin Mao Zedong ini dianggap terkait dengan Gerakan 30 September, maka banyak hal berbau Tionghoa sebisa mungkin dihilangkan oleh Orde Baru. Agamanya, juga kebudayaannya.

"Kami, pejabat Presiden Republik Indonesia menimbang: bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar," kata Soeharto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 1967 tanggal 6 Desember 1967 (Inpres 14 tahun 1967).

Jadi, bagi Soeharto, manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dianggap sebagai sesuatu yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia. Perayaan hari besar tradisi Tionghoa akhirnya juga sebisa mungkin tidak diramai-ramakan. Menurut Siew-Min Sai & Chang-Yau Hoon dalam *Chinese Indonesians Reassessed* (2013: 212), sebelum Inpres nomor 14 tahun 1967 dikeluarkan, pemerintah Orde Baru bahkan ingin agar tidak ada lagi sebutan Tionghoa bagi orang-orang Cina dan kebudayaan mereka.

"Pada waktu ini masih sering terdengar pemakaian istilah 'Tionghoa/Tiongkok' di samping istilah 'Cina' yang secara berangsur-angsur telah mulai menjadi istilah umum dan resmi," keluh pemerintah Orde Baru dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tanggal 28 Juni 1967.

Surat edaran yang dibuat Sekretaris Kabinet Presidium Ampera Brigadir Jenderal Sudharmono, S.H. itu seperti hendak mempertegas bahwa seharusnya sebutan untuk itu semua seharusnya adalah Cina. "Berdasarkan sejarah, maka istilah 'Cina'-lah yang sesungguhnya memang sejak dahulu dipakai dan kiranya istilah itu pulalah yang memang dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia," kata surat edaran tersebut.

Alasannya, seperti dimuat dalam poin kedua surat edaran, menurut pemerintah Orde Baru: "Dilihat dari sudut nilai-nilai ethologis-politis dan etimologis-historis, maka istilah Tionghoa atau Tiongkok mengandung nilai-nilai yang memberi *assosiasi-psykopolitis* yang negatif bagi rakyat Indonesia, sedang istilah 'Cina' tidak lain hanya mengandung arti nama dari suatu dynasti dari mana ras Cina tersebut datang, dan bagi kita umumnya kedua istilah itupun tidak lepas dari aspek-aspek psikologis dan emosional."

Meski orang Tionghoa di masa Orde Baru dibatasi hidupnya, di sektor perekonomian mereka berjaya. Walau kebudayaannya dikebiri dan dicap tidak wajar, para pengusaha berdarah Tionghoa mau tidak mau dijadikan penggerak perekonomian Indonesia. Orde Baru memang alergi terhadap aspirasi politik dan kebudayaan orang-orang Tionghoa, tapi tidak alergi terhadap uang dan bisnis mereka.

Setelah Orde Baru tumbang, istilah Tionghoa muncul lagi. Aturan soal sebutan Tionghoa dan yang mengekang kebudayaannya pun diubah. Presiden Abdurrahman Wahid pada 17 Januari 2000, lewat Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2000, mencabut Inpres No.14/1967. Di era kepresidenan Megawati Soekarnoputri, Imlek menjadi hari libur nasional. Lalu di zaman Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) jadi presiden, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 06/1967 dicabut melalui Keppres No. 12/2014.

4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses yang berkelanjutan dalam sebuah penelitian, setelah data terkumpul selanjutnya data-data tersebut dianalisis kebenarannya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun metode analisis data adalah sebagai berikut :

a. Interpretasi

Setelah selesai melakukan tahap kritik atau verifikasi sumber, langkah selanjutnya yaitu interpretasi atau yang lebih dikenal dengan penafsiran dari sebuah sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Menurut Herlina (2011: 15) "Interpretasi merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh."

Langkah-langkah dalam melakukan interpretasi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan sumber-sumber sejarah
2. Melakukan kritik
3. Menafsirkan fakta-fakta
4. Menetapkan makna dan keterkaitan antar sumber yang diperoleh kemudian menafsirkannya dalam kajian sejarah

Berdasarkan kutipan di atas dapat diambil pengertian berarti interpretasi adalah sebuah penjelasan, makna, arti, pendapat atau pandangan teori yang diperoleh dari pemikiran yang mendalam. Interpretasi merupakan suatu langkah dalam sebuah penelitian sejarah yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu dengan menafsirkan suatu fakta-fakta sejarah atau bukti-bukti sejarah agar teruji validitas dan realibilitasnya. Dalam tahap interpretasi ini peneliti dituntut untuk cermat dalam menganalisis apakah sumber yang dianalisis sesuai dengan tema yang sedang dikaji.

b. Historiografi

Metode analisis data setelah melakukan kritikan dan interpretasi sumber adalah historiografi. Historiografi adalah upaya peneliti mengungkapkan hasil penelitian berdasarkan sumber data yang didapat. R. Moh. Ali (2005: 37) mengungkapkan historiografi adalah: Langkah terakhir dalam sebuah penelitian sejarah adalah melakukan penulisan sejarah menjadi sarana

mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi (Daliman, 2014: 99).

Sejarah bukan semata-mata rangkaian fakta belaka, tetapi sejarah adalah sebuah cerita. Cerita yang dimaksud adalah penghubungan antar kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa dengan suatu pengertian bulat dalam jiwa manusia atau pemberian tafsiran/interpretasi kepada kejadian tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa historiografi membuktikan legitimasi sejarah sebagai suatu bentuk disiplin ilmiah. Historiografi merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarah yang menggabungkan dan mengkomunikasikan hasil dari tahap-tahap penelitian sejarah sebelumnya yaitu Heuristik, Verifikasi, dan Interpretasi. Dalam melakukan sebuah penelitian sejarah seharusnya mengedepankan kronologis, karena memang sesungguhnya sejarah tidak bisa terlepas dari kronologi waktu. Seperti yang diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo (1982: 14) "Dengan kata lain penulisan sejarah merupakan representasi kesadaran penulisan sejarah dalam masanya."

Tidak hanya mengedepankan konsep kronologi dalam sebuah penelitian sejarah tetapi peneliti juga harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proses dan tahap-tahap dalam penelitian sejarah mulai dari fase perencanaan sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan) berdasarkan data dan fakta yang diperoleh agar menjadi kisah selaras dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Adapun dalam penulisan sejarah akan dapat dinilai apakah dalam penelitiannya berlangsung sesuai dengan cara yang dipergunakannya tepat atau tidak, apakah sumber data yang mendukung penarikan kesimpulannya memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai atau tidak. Jadi dengan tata cara penulisan seperti itu akan dapat ditentukan kualitas dari penelitian sejarah itu sendiri.

F. Kerangka Teori dan Batasan Istilah

1. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam melakukan sebuah penulisan ini peneliti menggunakan kerangka pikir teori yang mendukung bertujuan sebagai landasan penelitian yang harapannya agar penelitian ini memperoleh hasil yang akurat. Menurut Kerlinger (2000:11)

Dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Dapat diambil pengertian bahwa kerangka teoritis merupakan pondasi utama dimana sepenuhnya penelitian itu ditujukan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan.

Etnis Tionghoa adalah salah satu Etnis di Indonesia yang asal usul mereka dari Tionghoa atau Tiongkok. Etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat didasarkan hanya dari kriteria ras, hukum ataupun budaya yang melatarbelakangi hadirnya etnis Tionghoa di Indonesia, tetapi pada identifikasi sosial. Di Indonesia seorang keturunan Tionghoa disebut orang Tionghoa, jika ia bertindak sebagai anggota dan mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat Tionghoa.

Kedatangan bangsa Tionghoa atau Tionghoa ke Indonesia pertama kali berorientasi hanya dalam bidang perdagangan. Orang Tionghoa merupakan imigran kelahiran Tiongkok yang tinggal di daratan Tionghoa dan menetap disana. Skinner (dalam Tan, 1981:1) menyatakan bahwa orang Tionghoa adalah imigran kelahiran Tiongkok atau keturunan imigran menurut garis laki-laki." Hal ini menandakan bahwa yang disebut Tionghoa adalah orang dari Tiongkok asli atau keturunannya yang ditandai dengan garis keturunan ayah atau patrilineal. Selanjutnya, menurut Ode (2012:120) menjelaskan bahwa "ada yang mengatakan bahwa orang-orang dari daratan Tionghoa sudah menginjakkan kakinya sejak 671 Masehi". Dari pendapat tersebut bahwa kedatangan orang Tionghoa sebenarnya sudah sejak lama, akan tetapi kedatangan orang Tionghoa ke Nusantara pada mulanya hanya lewat atau sekedar lewat dan tinggal beberapa minggu atau bulan saja, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain.

Masa-masa awal kedatangan orang Tionghoa adalah hanya untuk berdagang atau bisnis. Ode (2012:122) menyebutkan bahwa kedatangan orang Tionghoa, terutama di Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan, lebih bertujuan untuk kepentingan bisnis atau hubungan dagang." Selanjutnya, ada

yang menyebutkan bahwa awal mula kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia pada masa kerajaan adalah pada masa kejayaan Kerajaan Kutai di pedalaman Kalimantan, atau Kabupaten Kutai, yang daerahnya kaya akan hasil tambang emas itulah mereka dibutuhkan sebagai pandai perhiasan (Emas). Karena kebutuhan akan pandai emas semakin meningkat, maka didatangkan emas dari Tionghoa daratan, disamping itu ikut dalam kelompok tersebut adalah para pekerja pembuat bangunan dan perdagangan. Mereka bermukim menyebar mulai dari Kabupaten Kutai, Sanggau Pontianak dan daerah sekitarnya.

Pada zaman Orde Baru sistem ekonomi yang berkembang yaitu Sistem Cukong. Cukong adalah istilah Hokkian yang artinya majikan atau bos, tetapi dalam konteks Indonesia, istilah ini digunakan untuk menyebut seorang pedagang Tionghoa yang bekerja sama dengan elite yang berkuasa, termasuk presiden dalam perusahaan patungan. Umumnya mitra pribumi memberikan fasilitas dan perlindungan, sedangkan orang Tionghoa memberikan modal dan menjalankan perusahaan tersebut. Sistem cukong ini dianggap tidak menguntungkan pribumi, sehingga menimbulkan kritik pedas dari pihak pribumi terhadap pemerintahan Orde Baru. Mereka sangat kritis terhadap sistem ini karena tidak ada pemindahan ketrampilan. (Suryadinata, 2012:101)

Disamping itu juga karena hanya pihak yang berkuasa yang dapat menikmati hasilnya. Berhubung dengan protes yang dilakukan oleh pihak pribumi dan kerusuhan anti-Tionghoa yang makin sering terjadi pada tahun 70-an, pemerintah Orde Baru mulai mulai melaksanakan politik pribumi kembali dalam bidang ekonomi. Untuk memperoleh bagian yang lebih besar bagi pribumi dalam bidang ekonomi, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan pada 1974 dimana ditentukan bahwa penanaman modal asing harus berupa perusahaan patungan. Banyak bidang bisnis yang tertutup bagi orang Tionghoa Indonesia. (Suryadinata, 2012:101).

Dengan kata lain, surat izin baru tidak akan dikeluarkan lagi untuk pedagang nonpribumi. Peraturan yang mencerminkan kebijakan ini adalah Keppres No. 14 yang dikeluarkan pada tahun 1979. Keppres ini kemudian disempurnakan dan menjadi Keppres No. 14A /1980 yang mewajibkan semua lembaga pemerintah dan kementerian memberikan keistimewaan kepada pedagang dan kontraktor pribumi. Untuk proyek besar, usaha patungan antara pribumi dan non pribumi digalakkan, akan tetapi pribumi harus memiliki andil 50 persen dan harus aktif dalam perusahaan tersebut. Dalam dekade terakhir Orde

Baru konglomerat yang bersangkutan dengan Cendana tumbuh makin subur dan besar di Indonesia, sehingga menjadi sorotan Internasional. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kelompok Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) inilah yang sebetulnya menguasai ekonomi Indonesia, bukan orang-orang Tionghoa kelas menengah.

Para pemimpin di era reformasi tampaknya lebih toleran dibandingkan pemimpin masa Orde Baru. Sejak masa pemerintahan B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etnisitas saja, seperti etnis Jawa, Sunda, Batak, Arab, Tionghoa dan lain sebagainya. (Kakarisah, 2013)

Masih belum hilang dalam ingatan kita bagaimana Gus Dur berjuang membela etnis Tionghoa pada masa-masa sulit tahun 1998. Dan langkah yang diambil Gus Dur dianggap sulit diterima, bahkan bertentangan dengan pendapat umum yang menimpakan kesalahan pada orang-orang Tionghoa sebagai penyebab krisis ekonomi pada waktu itu. Beberapa saat setelah tragedi Mei 1998, Gus Dur (yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum PBNU) menyerukan kepada keturunan Tionghoa yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka. Dan kepada warga pribumi, Gus Dur menghimbau agar mau menerima dan membaur dengan warga keturunan Tionghoa tersebut. Perjuangan Gus Dur membela minoritas Tionghoa semakin tegas ketika Ia menjadi Presiden Republik Indonesia keempat yang diwujudkannya melalui berbagai kebijakan, Inpres No. 14 tahun 1967 yang kemudian dilanjutkan oleh Megawati dengan penetapan Imlek sebagai hari libur Nasional melalui Kepres No. 19 tahun 2002. (Tan, 1981:117)

Di saat bersamaan, Gus Dur juga mengajak bangsa Indonesia mewujudkan rekonsiliasi dengan Tionghoa. Bukan semata-mata karena ia sendiri keturunan Tionghoa, tapi Gus Dur melihat pada masa-masa mendatang Tionghoa sebagai suatu jaringan (*guanxi*) perlu dirangkul untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang baru saja dilanda krisis hebat. Dan untuk memulihkan ekonomi nasional, langkah pertama yang ia lakukan adalah memanggil kembali para pemilik modal agar mau berinvestasi di Indonesia. Gus

Dur yakin, suatu pemerintahan yang tidak menerapkan politik rasialis, akan membuat para "*guanxi*" merasa aman menanam modal di Indonesia.

Kelompok etnis Tionghoa dalam wawasan kebangsaan Gus Dur adalah sama dengan suku-etnis bangsa lain, seperti etnis-suku Jawa, Batak, Papua, Arab, India, Jepang dan Eropa yang sudah lama hidup dan menjadi penduduk atau warga negara Indonesia. Mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang sah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 19945. (Fikri AF, 2015: 83-84)

Dan kini, ketika area perdagangan bebas Asean-RRC dibuka, hubungan dengan Tionghoa tidak bisa dinafikan lagi. Gus Dur sudah sejak awal menyiapkan masuknya pengaruh Tionghoa, bukan saja dari sisi budaya, tapi juga ekonomi dan bisnis. Namun sayangnya, bangunan pandangan kebangsaan dan perjuangan Gus Dur tersebut baru bisa dirasakan relevansinya bagi kemajuan perekonomian Indonesia sekarang, setelah berpuluh tahun dan setelah beliau wafat.

2. Batasan Istilah

Dari batasan konsep diatas dan landasan teori diatas, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yaitu:

- a. Dominasi adalah suatu keadaan lebih daripada yang lain. Hal ini berarti bahwa dominasi merupakan suatu kelebihan yang terjadi pada suatu hal, objek, dan sebagainya terhadap hal lain yang mempunyai kesamaan sifat.
- b. Etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Leo Suryadinata (2002: 17) mengungkapkan:
Orang Tionghoa bukan merupakan kelompok homogen. Dari sudut kebudayaan, mereka pada dasarnya dapat dikategorikan kedalam dua kelompok besar, yaitu peranakan dan totok.
- c. Ekonomi adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ekonomi juga merupakan suatu pengukur tingkat kemajuan suatu negara. Ekonomi dunia atau dikenal dengan ekonomi global merupakan ekonomi masyarakat di seluruh dunia, negara-negara di dunia saling berhubungan dan saling keterkaitan.

- d. Perekonomian Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi perekonomian, serta mendorong kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan reformasi ekonomi di sebuah negara biasanya sangat kompleks, karena melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, serta dipengaruhi sejumlah faktor seperti ekonomi.

3. Kajian yang Relevan

Dalam penulisan sejarah ini peneliti juga harus menyesuaikan pula antara konsep pembahasan yang akan dikaji dengan literatur yang didapat dari penulisan sejarah terdahulu baik dalam sebuah bentuk referensi buku cetak, artikel jurnal, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam sebuah hasil penulisan sejarah. Adapun kajian penelitian yang relevan dengan kajian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa. Penelitian ini ditulis oleh Daud Ade Nurcahyo Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016. Dalam skripsi ini Daud Ade memfokuskan tiga permasalahan terhadap permasalahan Etnis Tionghoa yaitu munculnya kebijakan orde baru, pelaksanaan kebijakan orde baru terhadap etnis Tionghoa dan dampak dari kebijakan orde baru terhadap etnis Tionghoa. Hasil dari kebijakan Orde Baru yang ditulis dalam skripsi ini adalah dikeluarkannya Instruksi 1967-1998 yaitu kebijakan Soeharto yang melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa seperti instruksi presiden No.14/1967 yang dikeluarkan Soeharto yang melarang kegiatan agama kepercayaan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan dalam lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup.
- b. Eksistensi Masyarakat Tionghoa Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia. Penelitian ini ditulis oleh Seriwati Ginting Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dalam tulisan ini Seriwati memfokuskan Penelitian dan mengkaji tentang eksistensi masyarakat Tionghoa terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

(pembangunan) khususnya menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hasil dari tulisan ini yaitu pada masa Orde baru adanya kecemburuan dalam berpolitik larangan berorganisasi dan berbahasa Tionghoa. Namun saat pemerintahan Gusdur (Abdurrahman Wahid) presiden RI ke-4 mulai ada titik terang yakni manakala diakuinya agama Kong Huchu juga dikarenakan ada peran etnis Tionghoa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan memandang etnis Tionghoa sebagai bagian dari Republik Indonesia.

- c. Partisipasi Politik Warga Tionghoa Era Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001 (Studi Terhadap Surat Kabar Guo Ji Ri Bao). Penelitian ini ditulis oleh Sari Riantika Damayanti Universitas Paramadina Jakarta 2012. Adapun hasil dari tulisan ini ialah yang mengenai era kepemimpinan dan perjuangan Presiden Abdurrahman Wahid yang membuka keran-keran politik bagi etnis Tionghoa dan mencabut Instruksi Presiden No.14/1967 yang memberikan hak dan memiliki kebebasan sosial untuk etnis Tionghoa dalam berpartisipasi baik dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan maksud agar penelitian ini tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kesalahpahaman atau kesimpangsiuran, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian : Historis
2. Objek Penelitian : Eksistensi Dominasi ekonomi Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1986-2000
3. Subjek Penelitian : Buku-buku, literatur, dan sumber lain yang relevan dan mendukung penelitian ini.
4. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro dan Perpustakaan Daerah Kota Metro
5. Waktu Penelitian : Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020